

**ANALISIS PENGELOLAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PEMBANGUNAN DI DESA LABUHAN BILIK KECAMATAN  
TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

**Eko Mulyadi, Ellyan Sastraningsih**  
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Islam Riau  
*e-mail: ekomulyadi567@gmail.com*

**ABSTRACT**

This research was conducted in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The purpose of this study is to explain and evaluate the management of village funds in Labuhan Bilik Village from the perspective of village officials and village communities. This analysis is a descriptive type of evaluative descriptive research with percentage analysis and analysis of how effective the management of the Village Fund is in the Labuhan Bilik village. Data collection techniques used in this study were questionnaires, interviews and observations. Data analysis techniques in this study using percentage analysis were used to analyze and evaluate community knowledge and participation, governance, and their impact on village development. The results of the study show that village funds in Labuhan Bilik Village are widely used for development. Community knowledge about village funds is still lacking and the community is quite involved in fundraising activities. The governance of village funds which includes planning, implementation, and evaluation from the village government level to the community is quite good. Village funds have had a positive impact, especially on the road construction program which became the dominant program in 2019 and 2020.

**Keywords:** Knowledge, Participation, Governance, Development, Village Funds, Effectiveness

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan mengevaluasi pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Bilik dari perspektif Aparat desa dan Masyarakat desa. Analisis ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif evaluatif dengan analisis persentase dan analisis seberapa efektif pengelolaan Dana Desa yang ada di desa labuhan bilik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, wawancara serta observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis persentase digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan dan partisipasi masyarakat, tata kelola, dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan dana desa di Desa Labuhan Bilik banyak di gunakan untuk pembangunan. Pengetahuan masyarakat mengenai dana desa masih kurang dan masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan dana desa. Tata kelola dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tingkat pemerintah desa hingga kemasyarakat cukup baik. Dana desa telah memberikan dampak yang positif, terutama pada program pembangunan jalan yang menjadi program dominan pada tahun 2019 dan 2020.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, Partisipasi, Tata Kelola, Pembangunan, Dana Desa, Efektifitas

**PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah tindakan yang dilakukan untuk merubah sebuah keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara tumbuh atau proses, perkembangan, berkembang dan bertambah atau menumbuhkan semua sumber

daya yang ada agar menjadi banyak. Cakupan dalam pembangunan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik serta keamanan. Pembangunan sebenarnya adalah pencerminan dari usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital

untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, teknologi, telekomunikasi, dan energy. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi fondasi dan pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang dimana masuk kedalam agenda kerjanya dalam Nawacita, salah satu agenda dalam Nawacita adalah cita ketiga yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah masih timpangnya pembangunan antara kota dan desa.

Atas dasar tersebutlah cita ketiga dalam Nawacita tersebut di agendakan karena penduduk Indonesia mayoritasnya bermukim di daerah pedesaan, namun pembangunan di daerah pedesaan masih banyak tertinggal dibanding pembangunan di perkotaan. Oleh karena itu pembangunan di desa sangat perlu diperhatikan demi tercapainya pembangunan nasional yang merata.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas pembangunan Dana Desa disebutkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kebutuhan dasar seperti peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkung yang berkelanjutan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan desa harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antar pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat diajak untuk memberikan saran dan masukan dalam pembangunan desa mengenai apa saja yang dibutuhkan. Itu karena program yang digagas terdapat kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat serta masalah-masalah dan potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan tersebut tentunya dibutuhkan sumber pendanaan untuk digunakan dalam membiayai pembangunan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti tentang realisasi dana untuk membangun desa melalui Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang diberikan ke desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa diberikan dengan maksud sebagai pendorong dalam membiayai program-program pemerintah desa khusus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membangun desa maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 pasal 3 s/d 4 menyebutkan: "pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa itu bersumber belanja pemerintah dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan." Yang pengelolaanya melibatkan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Teluk Meranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Yang memiliki jumlah desa sebanyak 8 desa dan 1 kelurahan, yang mana terdiri dari Kelurahan

Teluk Meranti, Desa Labuhan Bilik, Desa Gambut Mutiara, Desa Kuala Panduk, Desa Pangkalan Terap, Desa Petodaan, Desa Pulau Muda, Desa Segamai, Desa Teluk Binjai. Rincian pengalokasian dana desa di setiap desa di Kecamatan Teluk Meranti tahun 2019 akan di jelaskan pada Tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah penerimaan Dana Desa

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)
1	Pangkalan Terap	802.547.585
2	Pulau Muda	1.543.560.000
3	Labuhan Bilik	1.455.906.000
4	Gambut Mutiara	876.906.000
5	Petodaan	780.670.000
6	Segamai	890.789.000
7	Teluk Binjai	834.456.000
8	Kuala Panduk	723.768.000

Sumber: Kantor Camat Teluk Meranti 2020

Dilihat dari data pada Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa desa dengan jumlah terbesar penerimaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Meranti Tahun 2019 adalah Desa Pulau Muda dengan jumlah Dana Desa yang di terima Rp1.543.560.000 sedangkan penerima Dana Desa terkecil adalah desa kuala panduk Rp723.768.000 Penentuan jumlah pembagian dana desa ini di tentukan oleh rasio jumlah penduduk desa dengan penduduk Kabupaten, rasio jumlah penduduk miskin desa dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten, rasio luas wilayah desa dengan luas Kabupaten, rasio indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten. Desa Labuhan Bilik merupakan salah satu desa yang menduduki peringkat kedua dalam penerimaan dana desa tahun 2019 dengan jumlah Rp1.455.906.000 Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Dana Desa yang di terima oleh Desa Labuhan Bilik dari tahun 2017-2020.

Tabel 2 Penerimaan Dana Desa Labuhan Bilik 2017 sampai 2020

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)	Peningkatan/Pe nurunan (%)
2017	847.327.000	-
2018	821.260.250	-3,08
2019	1.455.906.000	77,3
2020	995.394.000	-31,63

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Labuhan Bilik pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 menjadi pendapatan Dana Desa terbesar bagi Desa Labuhan Bilik dan mengalami peningkatan dari tahun 2018. Sesuai dalam Permendes no 8 tahun 2017 pasal 4, disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Labuhan Bilik dari tahun 2017 sampai 2020 sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik desa seperti pembuatan jalan rabat beton, pembanguna balai kesenian, pembangunan sumur bor, pembangunan gedung BUMDES, pembangunan gapura desa (kantor desa Labuhan Bilik;2020). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten pelalawan tahun 2020 Desa Labuhan Bilik memiliki luas desa sebesar ± 450,65 km dengan jumlah penduduk sebesar 1575 jiwa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar ini desa Labuhan Bilik mendapatkan dana desa yang cukup besar.

Dana desa yang jumlahnya besar ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, di dalam mengatur tata kelola dan target yang mau dicapai dari pemberian Dana Desa oleh pemerintah, maka pemerintah memberikan

buku bimbingan dan peraturan untuk mengatur penyelenggaraan Dana Desa Pemerintah juga mengeluarkan pedoman dalam bentuk Undang-Undang. Masyarakat desa sendiri juga umumnya tidak mengetahui adanya program pemerintah berupa dana desa, yang dimana dari ketidaktahuan tersebut membuat masyarakat kurang berpartisipasi terhadap dana desa, dalam tata kelolanya terutama dari sisi perencanaan. Masyarakat hanya berpartisipasi saat akan melakukan kegiatan dalam program dana desa misalnya perbaikan jalan yang dimana itu dikerjakan oleh masyarakat setempat. Terkait dengan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, masyarakat kebanyakan tidak memahami bagaimana tata kelola dana desa dari kantor desa setempat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluative. Penelitian deskriptif adalah sebuah lukisan atau gambaran yang sistematis serta akurat dan faktual mengenai masalah yang diselidiki, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan cara mengumpulkan informasi atau data mengenai sebuah pelaksanaan atau implementasi kebijakan (Arikunto, 2010).

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2014), populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang ada di Desa Labuhan Bilik yang berjumlah 369 KK yang didapat berdasarkan data yang terima dari pemerintah Desa Labuhan Bilik. Untuk menentukan sampel penelitian ini, maka menggunakan

rumusan slovin. Dimana rumus dalam menghitung sampel dapat dilihat sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dengan rumus di atas, maka perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{369}{1 + 369 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{369}{1 + 8,3025}$$

$$n = \frac{369}{9,3025}$$

$$n = 39,66$$

dibulatkan menjadi 40 kepala keluarga di Desa Labuhan Bilik

Sedangkan dalam menentukan sampel untuk aparat desa diambil berdasarkan jabatannya di desa semuanya berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, kasi pembangunan, kaur keuangan, kaur umum, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kaur pemerintahan, kapala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *pertama* Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung di wilayah atau lokasi penelitian tersebut kemudian membuat pencatatan dari pengamatan tersebut yang dapat digunakan sebagai data, dalam penelitian ini lokasi tersebut adalah desa Labuhan Bilik.

*Kedua*, wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan kunci yang akan di wawancarai. Wawancara mendalam dilakukan dengan bertanya jawab antara peneliti dan informan kunci dengan lebih menggali lagi jawaban-jawaban dari informan kunci tanpa menggunakan panduan atau daftar pertanyaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Dana Desa

Dalam penelitian ini pengetahuan dan partisipasi masyarakat melihat bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dari apakah masyarakat mengetahui atau tidak tentang program dana desa, masyarakat mengetahui atau tidak sebab dari diberikannya dana desa, apakah masyarakat mengetahui tujuan diberikannya dana desa dan apakah masyarakat mengetahui adanya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah desa tentang program dana desa. Kemudian partisipasi masyarakat dengan adanya program dana desa dilihat dari apakah masyarakat memberikan sumbangan berupa tenaga dari program yang dijalankan yang bersumber dari dana desa dan apakah masyarakat memberikan sumbangan dan bantuan peralatan kepada pelaksanaan program dana desa.

Tabel 1

#### Tanggapan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan Dana Desa

Pertanyaan	SS	S	KS	T	STS
Tahu Tentang Dana Desa	2	20	13	5	0
Tahu Sebab diberikannya Dana Desa	0	7	24	10	0
Tahu Tentang Tujuan di Berikannya Dana Desa	1	7	25	7	0
Tahu Adanya Sosialisasi dari Pemerintah Tentang Dana Desa	0	6	20	10	4

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data olahan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai dana desa, sebagian besar masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan setuju mengenai tahu akan adanya program dana desa dengan persentase 50%. Namun responden yang mengatakan kurang setuju

dalam mengetahui adanya program dana desa juga cukup tinggi dengan 32,5% dari seluruh sampel penelitian.

Mengenai apa yang menjadi penyebab dari pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, sebanyak 60% masyarakat mengatakan kurang setuju bila ditanyai apakah mereka mengetahui sebabnya dan hanya 15% yang mengetahui sebab dari diberikannya dana desa. Jawaban dari responden yang mengatakan mengetahui sebab dari dana desa umumnya mengatakan sebabnya adalah untuk membangun desa agar lebih baik, serta ada juga yang mengatakan untuk membangun jalan baru dan memperbaiki yang rusak, dan ada juga yang mengatakan untuk membangun desa supaya lebih maju. Namun untuk masyarakat yang mengatakan kurang setuju bila dikatakan mengetahui sebab diberikannya dana desa mereka mengatakan bahwa itu hanya program pemerintah untuk desa, mengenai sebab mengenai pemberian mereka tidak mengetahui pasti.

Pengetahuan akan tujuan diberikannya dana desa dimana masyarakat desa Labuhan Bilik mengaku mereka kurang mengetahui akan tujuan dari diberikannya dana tersebut. Sebesar 62,5% masyarakat mengatakan kurang setuju terhadap pernyataan tahu akan tujuan diberikannya dana desa, sebab mereka pun tidak mengetahui sebab diberikannya dana desa ke pemerintah desa. Hanya satu orang yang mengatakan sangat setuju, dan ketika didalami beliau mengatakan biasanya berbinbang-bincang dengan sekretaris desa. Menurut beliau tujuannya adalah untuk modal dalam pembangunan desa, karena desa tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk pembangunan desa sehingga pemerintah memberikan dana desa tersebut.

Mengenai sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa, 50% dari total responden mengatakan kurang setuju bila dikatakan mereka mengetahui adanya

sosialisasi tentang dana desa dari aparat desa. Masyarakat merasa tidak adanya sosialisasi langsung yang diberikan ke masyarakat dari aparat desa tentang dana desa ini dan hanya perangkat RT atau RW saja yang mungkin lebih mengetahuinya karena sering datang ke kantor desa. Sedangkan untuk yang mengatakan setuju atau benar mereka mengetahui sosialisasi dana desa sebesar 15% dimana mereka yang mengetahui pernah ikut dengan perangkat RT atau RW untuk menghadiri musrenbang desa yang dimana didalam musrenbang dibahas mengenai dana desa.

Dalam partisipasi masyarakat terhadap program-program dana desa masyarakat mengaku bersedia untuk berpartisipasi. Namun jika untuk memberikan bantuan berupa dana kepada program dana desa, sebanyak 45% masyarakat mengatakan tidak setuju bila hal itu dilakukan karena hanya dirasa memberatkan saja. Sedangkan 5% responden mengatakan sangat setuju bila hal itu dilakukan dengan catatan tidak adanya batasan minimal khusus terhadap dana yang diberikan, melainkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing pribadi saja.

Namun lain halnya bila diminta berpartisipasi dalam hal gotong royong dalam menggunakan tenaga untuk melaksanakan program dana desa, sebanyak 87,5% masyarakat mengatakan setuju. Beberapa responden mengatakan kegiatan dana desa yang memerlukan bantuan tenaga masyarakat dalam mengerjakannya dapat mereka jadikan sebagai cara untuk berkumpul bersosialisasi dan lebih mempererat kebersamaan dalam bergotong-royong. Sedangkan hanya 2,5% masyarakat yang mengatakan sangat tidak setuju untuk berpartisipasi dalam hal bantuan tenaga karena dirasa bila untuk tenaga dalam pengerjaan program dana desa seharusnya itu dicari sendiri oleh pemerintah desa agar masyarakat merasakan langsung tanpa harus

bersusah payah turun tangan dalam memabantu kegiatan tersebut.

Perihal sumbangan peralatan, 50% responden mengatakan setuju dan tidak keberatan bila diperlukan peralatan dari masyarakat selama peralatan yang mereka miliki masih memadai dan dapat digunakan serta alasan lain lebih leluasa bila menggunakan alat kerja sendiri, demikian yang dikatakan salah seorang responden. Namun terdapat juga masyarakat yang kurang setuju bila memberikan sumbangan peralatan, sebesar 27,5% masyarakat mengatakan demikian.

## **SIMPULAN**

Dana desa di desa Labuhan Bilik difokuskan untuk digunakan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan dimana program yang paling banyak pada bidang pembangunan adalah pembangunan jalan dan pembuatan saluran air serta pada bidang pemberdayaan masing-masing hanya terdapat satu program pada tahun anggaran berjalan yaitu pelatihan dan penyuluhan perternakan sapi dan kambing dalam rangka meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat miskin pada tahun 2019, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020.

Pengetahuan masyarakat tentang program dana desa di desa Labuhan Bilik masih sebatas mengetahui akan adanya program tersebut, namun belum sampai pada mengetahui sebab diberikannya dana desa, tujuan diberikannya dana desa serta belum mengetahui mengenai sosialisasi tentang dana desa. Pada partisipasinya terhadap program-program dana desa, masyarakat bersedia untuk turut berpartisipasi dalam hal memberikan sumbangan berupa bantuan tenaga dan peralatan namun tidak dalam memberikan bantuan berupa dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. *Law Enforcement Executive Forum Journal*, 8 (1), 73-82.
- Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiat, M.N. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-Unhalu*. Volume XVI Tahun 8, Desember 2015.
- Aljannah, S. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. *JOM Fekon Vol.4 No.1 (Februari) 2017*
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad. L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Atahrim. & Fahrin, A. (2013). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boediono, (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Christian, H. (2015). *Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDes) Tahun 2013 di Desa Loajanan Ulu Kecamatan Loajanan Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1, 2015
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 1 Maret 2017: 52 – 58
- Fauzan, A.W. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harning, S.V., & Amri. (2016). Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016.
- Irawan., & Suparmoko, M. (2014). *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*, Yogyakarta: BPFE.
- Luthfi, A., Rini, H.S., et al (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesobroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menajang., & Heidy. (2010). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mering. A., Djumlani, A., & Syahrani. (2015). *Pembangunan Desa Pedalaman di Desa Long Nyelong Kecamatan*

- Busang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.2 , April - Juni 2015.
- Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif di KPU Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*. Vol. 4, No.2, April 2017
- Novita, D. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Noor, H.F. (2015). *Ekonomi Publik Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Nurhayani. (2012) Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas Jambi* Vol.1, No.5, April 2012
- Pangalila, M.R. (2014). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP dan Disclaimer Yang Ada di Sulut. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* Vol. 2, No.4, 2014:1-11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Tata Cara Penglokasian, Penyalura, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Prasetyo, B., & Jannah, L.M. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati. (2016). Peran Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Haluoleo, Kendari.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Sari, I.M., & Faisal, A.M. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 15, No.01 Juni 2017.
- Sofiyanto, M., & Mardani, R.M. (2016). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V.J., & Mirah, A.D.P. (2017). Dampak Program dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sembawang

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana  
Tidung.

Todaro, M., & Smith, S. (2011).  
Pembangunan Ekonomi Edisi ke  
Sebelas. Jakarta: Erlangga

Tri, W. (2006). Perencanaan Pembangunan:  
Aplikasi Komputer (Era Otonomi  
Daerah). Yogyakarta: UPP STIM  
YKPN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
6 Tahun 2014 Tentang Desa.